

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini, N. S., & Gorda, A. S. (2021). Menyigi Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Pada Era Pandemi. *Open Journal Systems Vol.16 No.2*, 6349.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- JawaPos. (2021, Desember 7). *Kades Dicatut Terlibat Korupsi Pajak*. Retrieved from <https://radarbojonegoro.jawapos.com/berita-daerah/tuban/07/12/2021/kades-dicatut-terlibat-korupsi-pajak>. Diakses pada 20 Desember 2021
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 995.
- Kementerian Kesehatan. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan. (2020, November 14). Apresiasi FKTP Berjuang Di Garda Terdepan, Kemenkes Adakan Jambore Virtual Bagi Tenaga Kesehatan di FKTP dalam rangkaian HKN.
- Kementerian Keuangan. (2021, Agustus 31). Pemerintah Terus Upayakan Pemulihan Ekonomi, namun Tetap Waspada terhadap Pandemi Covid.
- Kompas.com. (2021, Maret 11). *Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam->

sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all.

Diakses pada 20 Desember 2021

Kontan.co.id. (2020, Februari 3). *Ditjen Pajak simplifikasi NPWP bendahara pemerintah*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-simplifikasi-npwp-bendahara-pemerintah>. Diakses pada 3 Maret 2022

Mapanawang, M. A., Sondakh, J., & Pusung, R. (2018). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*13(2), 30-37.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mufarokhah, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*13(4), 67-75.

Mufarokhah, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 67-75.

Muhyiddin. (2020, Juni). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 241.

PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan

- Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. (n.d.).*
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2.,* 193-202.
- (n.d.). *Susunan Dalam Satu Naskah UU Nomor 8 Tahun 1983 STDD Nomor 42 Tahun 2009.*
- Tribunnews. (2020, Juli 17). *Tugas Besar Puskesmas di Masa Pandemi Covid-19.* Retrieved from <https://www.tribunnews.com/corona/2020/07/17/tugas-besar-puskesmas-di-masa-pandemi-covid-19>. Diakses pada 21 Desember 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (n.d.).*
- Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Bank Sulutgo di Kota Manado. *Jurnal EMBA,* 916-923.